



Laporan Kinerja Triwulan 2 BPMP Provinsi Bengkulu Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada BPMP Provinsi Bengkulu selama triwulan 2 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 2	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen				
[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	64,06	Persen	0	0
[IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	57,61	Persen	0	0
[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Bengkulu				
[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Bengkulu dengan kategori sangat baik	Sangat Baik	Kategori	-	-
[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Bengkulu minimal A	A	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen

[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran

Progress/Kegiatan

Kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung ketercapaian IKK 1.1 adalah

1. Sosialisasi Program Sahabat Sekolah Dasar telah terlaksana dengan menggunakan moda daring melalui *Zoom Meeting* pada tanggal 12 Juni 2025. Kegiatan ini melibatkan 5 orang petugas dari BPMP Provinsi Bengkulu dengan jumlah peserta sasaran sebanyak 116 orang, yang terdiri atas unsur Pejabat Bidang Pembinaan Sekolah Dasar serta seluruh Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar di Provinsi Bengkulu. Adapun fokus utama kegiatan sosialisasi ini adalah memberikan pendampingan kepada sekolah dasar dalam rangka penguatan literasi, numerasi, serta pengembangan budaya belajar.
2. Sosialisasi Panduan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2025 secara daring melalui *Zoom Meeting*. Kegiatan ini menghadirkan 2 orang narasumber, didukung oleh 1 orang moderator serta 1 orang host. Peserta kegiatan berasal dari unsur Dinas



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi serta Satuan Pendidikan se-Provinsi Bengkulu. Fokus utama kegiatan ini adalah pembentukan karakter dan perilaku positif anak yang dapat menunjang keberhasilan proses pembelajaran.

Kendala/Permasalahan

Kendala pada IKK 1.1 adalah

1. Tidak semua peserta mengisi daftar hadir yang telah disiapkan, sehingga jumlah total peserta yang mengikuti kegiatan ini tidak dapat terdata secara keseluruhan.
2. Adanya efisiensi anggaran menyebabkan cakupan sosialisasi terbatas dan membuat jumlah sekolah sasaran lebih sedikit.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi/Tindak lanjut pada IKK 1.1 adalah

1. Memanfaatkan *platform* dalam jaringan (*daring*) agar jangkauan lebih luas dengan biaya efisien.
2. Integrasi 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat ke dalam kurikulum sekolah dan pelatihan guru untuk menginternalisasi nilai karakter ke pembelajaran.
3. Optimalisasi peran KKKS sebagai wadah berbagi praktik baik serta kolaborasi dengan mitra/komunitas belajar untuk memperluas cakupan sasaran.

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen

[IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan

Progress/Kegiatan

Kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung ketercapaian IKK 1.2 adalah

1. Pendampingan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Kesiapan Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Provinsi Bengkulu Tahun 2025 telah dilaksanakan melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) pada tanggal 15 s.d. 19 Mei 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung di 10 kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu dengan melibatkan 40 orang petugas dari BPMP Provinsi Bengkulu. Sasaran kegiatan adalah 10 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, yang menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan kebijakan SPMB di wilayah masing-masing. Tujuan utama pendampingan ini adalah untuk memperkuat koordinasi serta memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pemerintah daerah mengenai mekanisme, prosedur, dan teknis pelaksanaan SPMB Tahun 2025.
2. Pendampingan Implementasi Kebijakan E-Ijazah Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Bengkulu Tahun 2025 telah dilaksanakan secara *daring* melalui Zoom Meeting pada tanggal 20 s.d. 21 Mei 2025. Kegiatan ini dipimpin oleh 1 orang Penanggung Jawab (PJ), menghadirkan 2 orang narasumber, serta didukung oleh 12 orang panitia dari BPMP Provinsi Bengkulu. Adapun rincian sasaran peserta adalah sebagai berikut:
 - Tanggal 20 Mei 2025 : Operator Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar se-Provinsi Bengkulu sebanyak 1.289 orang.
 - Tanggal 21 Mei 2025 :
 - Operator Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 380 orang.
 - Operator Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 109 orang.
 - Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi di Provinsi Bengkulu sebanyak 11 orang.
3. Bimbingan Teknis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan bagi TPK SP dan Satgas PPK se-Provinsi Bengkulu telah dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 24 Mei 2025 di 10



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan pembagian lokasi sebagai berikut:

- 22 s.d. 24 Mei 2025 : Kabupaten Kaur dan Mukomuko.
- 23 s.d. 24 Mei 2025 : Kabupaten Kepahiang, Rejang Lebong, Lebong, Seluma, Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara.
- 24 Mei 2025 : Kota Bengkulu.

Kegiatan ini melibatkan unsur petugas dan penyelenggara dengan rincian:

- Narasumber Daerah : 10 orang
- Narasumber BPMP Provinsi Bengkulu : 10 orang
- Perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota : 10 orang
- Panitia : 60 orang
- Penanggung Jawab (PJ) : 1 orang
- Anggota/Narasumber tambahan : 1 orang

Total sasaran peserta : 600 orang. Adapun sasaran peserta kegiatan adalah:

- Dinas Pendidikan Provinsi : 1 orang
- Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota : 20 orang
- Cabang Dinas Pendidikan : 9 orang
- TTPK PAUD Kabupaten/Kota : 230 orang
- TPK SD : 160 orang
- TPK SMP : 100 orang
- TPK SMA : 80 orang

4. Pendampingan Program Makan Bergizi Gratis pada Satuan Pendidikan Tahun 2025 telah dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2025. Kegiatan ini melibatkan unsur penyelenggara dengan rincian:

- Penanggung Jawab (PJ) : 1 orang
- Narasumber : 3 orang
- Panitia BPMP Provinsi Bengkulu : 10 orang

Adapun sasaran kegiatan terdiri dari:

- 136 orang perwakilan satuan pendidikan
- 15 orang perwakilan dari BPMP Provinsi Bengkulu

5. Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Provinsi Bengkulu Tahun 2025 telah dilaksanakan pada tanggal 16 Juni s.d. 10 Juli 2025 di 10 kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini melibatkan 62 orang petugas dari BPMP Provinsi Bengkulu dengan jumlah sasaran sebanyak 162 orang, yang terdiri atas unsur Dinas Pendidikan, cabang dinas pendidikan, serta pemangku kepentingan pendidikan terkait pelaksanaan SPMB di daerah. Tujuan utama kegiatan pemantauan ini adalah untuk memastikan bahwa proses penerimaan murid baru di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu transparan, objektif, akuntabel, dan berkeadilan.

6. Pendampingan Program Makan Bergizi Gratis pada Pemerintah Daerah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tahun 2025 telah dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 24 Juni 2025 bertempat di Hotel Santika, Bengkulu. Kegiatan ini melibatkan unsur penyelenggara dengan rincian:

- Penanggung Jawab (PJ) : 1 orang
- Narasumber : 4 orang
- Panitia : 3 orang

Adapun sasaran kegiatan terdiri dari:

- 23 orang unsur Dinas Pendidikan
- 8 orang unsur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

- 16 orang perwakilan dari BPMP Provinsi Bengkulu

Kendala/Permasalahan

Kendala pada IKK 1.2 adalah

1. Efisiensi anggaran menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa menjangkau semua kabupaten/kota secara optimal.
2. Masih ada satuan pendidikan yang belum memiliki Satgas/TPK aktif dan keterbatasan pemahaman guru serta tenaga kependidikan dalam penanganan kasus.
3. Monitoring kualitas gizi di sekolah belum optimal.
4. Kesiapan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sekolah belum merata dan masih ada sekolah yang kesulitan teknis dalam penerapan aplikasi.
5. Kurangnya sosialisasi ke masyarakat mengenai SPMB.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi/Tindak lanjut pada IKK 1.2 adalah

1. Monitoring & evaluasi rutin efektivitas Satgas di Satuan Pendidikan dan penguatan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan/Aparat Hukum.
2. Kolaborasi dengan Dinas Kesehatan, BAPPEDA, PKK Kabupaten/Kota/Provinsi dan mitra lokal.
3. Pelatihan intensif untuk operator sekolah terkait E-ljajah.
4. Sosialisasi luas melalui media lokal, website sekolah dan Dinas Pendidikan terkait SPMB.

[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Bengkulu

[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Bengkulu dengan kategori sangat baik

Progress/Kegiatan

Kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung ketercapaian IKK 2.1 adalah

BPMP Provinsi Bengkulu tahun 2025 telah melakukan beberapa kegiatan/aktivitas untuk mencapai target ini yaitu :

1. Melakukan revisi POK menyesuaikan dengan hasil pemantauan.
2. Melakukan estimasi serapan anggaran dengan revisi Hal III DIPA.
3. Melaksanakan pelaporan capaian output pada aplikasi SAKTI tepat waktu.
4. Melaksanakan pelaporan keuangan pada aplikasi SAKTI tepat waktu.
5. Melaksanakan sinkronisasi BMN pada aplikasi SAKTI tepat waktu.

Kendala/Permasalahan

Kendala pada IKK 2.1 dalam mencapai target ini adalah sebagian kegiatan belum bisa dikerjakan tepat waktu sesuai dengan rencana yang ada di DIPA karena efisiensi anggaran.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi/Tindak lanjut pada IKK 2.1 adalah

1. Melakukan penjadwalan ulang kegiatan dengan menyesuaikan prioritas pada program/kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian IKK.
2. Mengoptimalkan moda pelaksanaan alternatif (misalnya daring atau hybrid) agar kegiatan tetap berjalan meskipun anggaran terbatas.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

3. Memperkuat mekanisme monitoring agar kegiatan yang tertunda tetap terpantau dan dapat segera dilaksanakan ketika dukungan anggaran tersedia.

[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Bengkulu

[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Bengkulu minimal A

Progress/Kegiatan

Kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung ketercapaian IKK 2.2 adalah

1. Pada bulan Juni Tahun 2025, Tim Barang Milik Negara (BMN) telah melaksanakan proses likuidasi satuan kerja dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan kode satker 023419548 yang dialihkan menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan kode satker 138693252. Proses likuidasi ini mencakup penyesuaian dan pemindahan data pada modul Persediaan, Aset Tetap, serta General Ledger Pertanggungjawaban (GLP) dalam Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan. Sebagai bagian dari tindak lanjut, Tim BMN telah menyusun:

- Laporan Catatan Barang Milik Negara (BMN) untuk kode satker 023419548 dengan saldo nihil (0) sebagai bentuk penutupan administratif.
- Laporan Catatan BMN untuk kode satker 138693252 Semester I Tahun 2025 sebagai dasar pencatatan awal pada satuan kerja yang baru.

Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMN yang berlaku, dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses transisi dan pencatatan BMN berjalan secara tertib administrasi, transparan, akuntabel, serta mendukung penyajian laporan keuangan pemerintah yang andal.

2. Menyusun ulang RKAKL sesuai hasil revisi, melakukan revisi POK, menyusun ulang TOR kegiatan, menyusun Perjanjian Kinerja, menyusun Rencana Aksi Kegiatan, melakukan Revisi tingkat satker 9 kali dan Revisi tingkat Unit sebanyak 7 kali, melakukan pelaporan kinerja bulanan 3 kali (sebelum tanggal 10 setiap bulan), melakukan pelaporan output bulanan 3 kali (sebelum tanggal 5 setiap bulan).

3. Sepanjang bulan Mei hingga Juni 2025, aktivitas utama pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) difokuskan pada persiapan menghadapi penilaian dari Tim Penilai Internal (TPI) dalam rangka evaluasi pembangunan ZI-WBK tingkat Kemendikdasmen. Upaya yang dilakukan antara lain mengikuti beberapa pendampingan secara daring dari Setditjen PAUD Dasmen, dengan tujuan menyesuaikan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai ketentuan yang dipersyaratkan. Selain itu, sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, BPMP Provinsi Bengkulu juga tetap melaksanakan pemantauan periodik bulanan, yaitu pada setiap minggu terakhir di bulan berjalan, guna memastikan progres pembangunan ZI-WBK tetap terpantau dengan baik.

4. Pada bulan Mei Tahun 2025, pegawai BPMP Provinsi Bengkulu telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi melalui moda pembelajaran daring dan luring. Adapun rincian partisipasi pegawai adalah sebagai berikut:

- 7 orang mengikuti Pelatihan Teknis Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial
- 1 orang mengikuti Pelatihan Teknis Manajemen Risiko
- 2 orang mengikuti Pelatihan Teknis Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Kerja (K3L)
- 1 orang mengikuti Pelatihan Teknis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Secara keseluruhan terdapat 11 orang pegawai yang mengikuti pelatihan pada periode ini. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis, pemahaman regulasi, serta kapasitas pengelolaan keuangan negara, sehingga dapat mendukung kinerja BPMP Provinsi Bengkulu yang lebih akuntabel dan profesional

Kendala/Permasalahan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Kendala pada IKK 2.2 adalah

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
Beberapa kegiatan tim kerja memerlukan tenaga yang kompeten dalam jumlah yang cukup. Keterbatasan jumlah SDM yang memiliki keahlian khusus menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat berjalan maksimal seperti misalnya belum lengkapnya kriteria/syarat menjadi Pejabat Pengadaan sehingga BPMP memakai tenaga konsultan dari kelompok PBJ Biro Umum Setditjen.
2. Koordinasi dan Kolaborasi Antar Stakeholder
Koordinasi dan komunikasi tim kerja dengan pemangku kepentingan lainnya kadang mengalami hambatan, terutama dalam hal komunikasi dan sinergi pelaksanaan program.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi/Tindak lanjut pada IKK 2.2 adalah

1. Sosialisasi dalam menyusun rencana kerja yang lebih terukur secara *cascading* dan termonitor secara terjadwal.
2. Memaksimalkan pelaksanaan apel pagi "camkoha".

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DI.7605.QDB.750] Satuan PAUD Dikdas Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	1282	2490	Rp4.277.469.000	Rp1.270.282.860	29.70
2	[WA.7606.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	0	0	Rp10.000.000	Rp0	0.00
3	[WA.7606.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp340.000.000	Rp0	0.00
4	[WA.7606.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp17.712.962.000	Rp11.505.384.761	64.95
Total Anggaran					Rp22.340.431.000	Rp12.775.667.621	57.19

D. Rekomendasi Pimpinan

Memperhatikan kendala yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan serta mencermati langkah strategi yang akan ditempuh oleh penanggungjawab kegiatan, maka upaya yang sebaiknya diambil adalah :

1. Setiap tim agar mencermati POS urusan agar POS yang ada benar-benar dapat memperlancar kegiatan Balai sedangkan POS yang belum mampu mendukung kegiatan Balai dapat diperbaiki.
2. Agar setiap wali wilayah diberikan tugas yang lebih jelas sehingga keberadaan wali wilayah benar-benar memberikan peningkatan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan Balai.
3. Secara bertahap SKP Pegawai dijelaskan dengan lebih rinci agar tidak menimbulkan tumpang tindih atau kekosongan penanggungjawab suatu pekerjaan.
4. Perlu kita upayakan untuk membentuk sistem koordinasi dan komunikasi yang lebih baik dan luwes



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

yang dapat memberikan nilai lebih pada hubungan Balai dengan unit kerja di pemerintah daerah.

Bengkulu, 28 Agustus 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala

SABURA SOE'OED PUTRA



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**